

ABSTRAK

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. Perkawinan Campuran telah merambah seluruh wilayah Indonesia. Notaris berperan dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, warisan dll. Berhubungan dengan masalah perkawinan antara laki-laki WNA dan perempuan WNA apalagi tentang hak akses tanah bagi perempuan WNI dan segala permasalahannya. Oleh karena itu penulis mengambil judul tentang **Tinjauan Yuridis tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XIII/2015)**. Isinya Putusan MK tersebut tentang : Pengujian UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia th 1945. Dalam putusan itu menyebutkan Pemohon, **Ny. Ike Farida seorang warga Negara Indonesia**. Pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan **laki-laki berkewarganegaraan Jepang** berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama** Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur No. 3948/VII/1995, pada Kantor Catatan Sipil Prop. DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Terkait pernikahannya, Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya Indonesia serta tinggal di Indonesia. Pemohon hendak membeli Rumah Susun di Jakarta, setelah lunas, Rusun tidak kunjung diserahkan, bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang. Maka dirumuskan permasalahannya itu : 1) Bagaimana prosedur perolehan hak atas tanah bagi perempuan WNI yang terikat perkawinan campuran ? 2). Kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam memperoleh Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XIII/2015)? Adapun penelitian ini bersifat *sosiologis atau empiris*, dimana penulis melakukan penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat, wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional, Notaris, dan dua perempuan WNI yang menikah dengan WNA. Dan meneliti peraturan yang berhubungan dengan perkawinan campuran, yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Notaris mempunyai peranan yang penting dalam membantu klien tentang : prosedur memperoleh hak atas tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA yaitu dengan penurunan hak, misal dari Hak Milik menjadi Hak Pakai, dimana penurunan haknya oleh pemilik tanah. Kendala-kendalanya adalah masalah domisili bagi laki-laki WNA yang menikah dengan WNI, dan pasangan perkawinan campuran antara WNI dan WNA tidak membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan mereka. Adapun solusinya adalah apabila tanah itu luas bisa dibagi2 : 1/2 ; 1/2 untuk istri, tanah itu diturunkan menjadi Hak Pakai dengan mendaftarkan di BPN, dan membuat perjanjian perkawinan.

Kata Kunci :Perkawinan Campuran, Perempuan WNI, Hak Akses Atas Tanah.

ABSTRACT

Mixed marriages are marriages involving a race between nations, therefore, marriage is also subject to the principles applicable in the Indonesian Law and International Law. Mixed marriage has penetrated the whole of Indonesia . Notary role in making the deeds relating to pernikahan marriage, inheritance etc. Dealing with the issue of marriage between men and women WNA WNA especially about women's access rights to land for the citizen and problems. Therefore, the authors take the title on the Juridical Review of the Acquisition of Land Rights for Women Bound citizen Mixed Marriage (Case Study No. Constitutional Court.69 / PUU XIII / 2015). The contents of the Constitutional Court about: Testing Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation and the Basic Agrarian Law No. 1 of 1974 on Marriage of the Constitution of the Republic of Indonesia th 1945. Dalam decision mentions the Applicant, Ny. Ike Farida an Indonesian citizen. Applicant is a woman who is married to a Japanese national men by a valid marriage and are registered in the District Office of Religious Affairs Makasar East Jakarta Municipality No. 3948 / VII / 1995, the Civil Registry Office Prop. DKI Jakarta as defined in the Marriage Reports Receipt No. 36 / KHS / AI / 1849/1995/1999 dated May 24, 1999. Related to marriage, the applicant does not have marital separation agreement treasures, never abandoned his Indonesian citizenship and disenfranchised here at home. Applicant want to buy Flats in Jakarta, after the keel, towers not being handed over, and even then the purchase agreement terminated unilaterally by the developer. Then formulated the problems are: 1) What is the procedure of acquiring land rights for women citizens who are bound intermarriage? 2). Constraints and solutions that arise in obtaining the Women's Land Rights for citizens who are bound Mixed Marriage (Case Study No. Constitutional Court.69 / PUU XII / 2015)? As this study is sociological or empirical, in which the authors conducted a study which examined at first was secondary data, then resumed research on primary data in the field, or to society, an interview with the National Land Agency, notary, and two female citizens who marry foreigners. And examine the rules relating to mixed marriages, prevailing in Indonesia. The results showed the conclusion that the Notary has an important role in helping clients about: procedures for securing land rights for the citizen who is married to foreigners, namely the reduction in the rights, for example, from Properties menjai Hak Pakai, the reduction in the rights of land owners. Constraints faced is the problem of domicile for male foreigners who are married to the citizen, and a couple of mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners do not make a marriage agreement during their marriage. The solution is that if the land area can be divided into 2: 1/2; 1/2 for the wife, the land was downgraded to a Right of Use by registering at BPN, and made a covenant marriage.

Keywords: Mixed Marriage, Women citizen, Right of Access to Land.